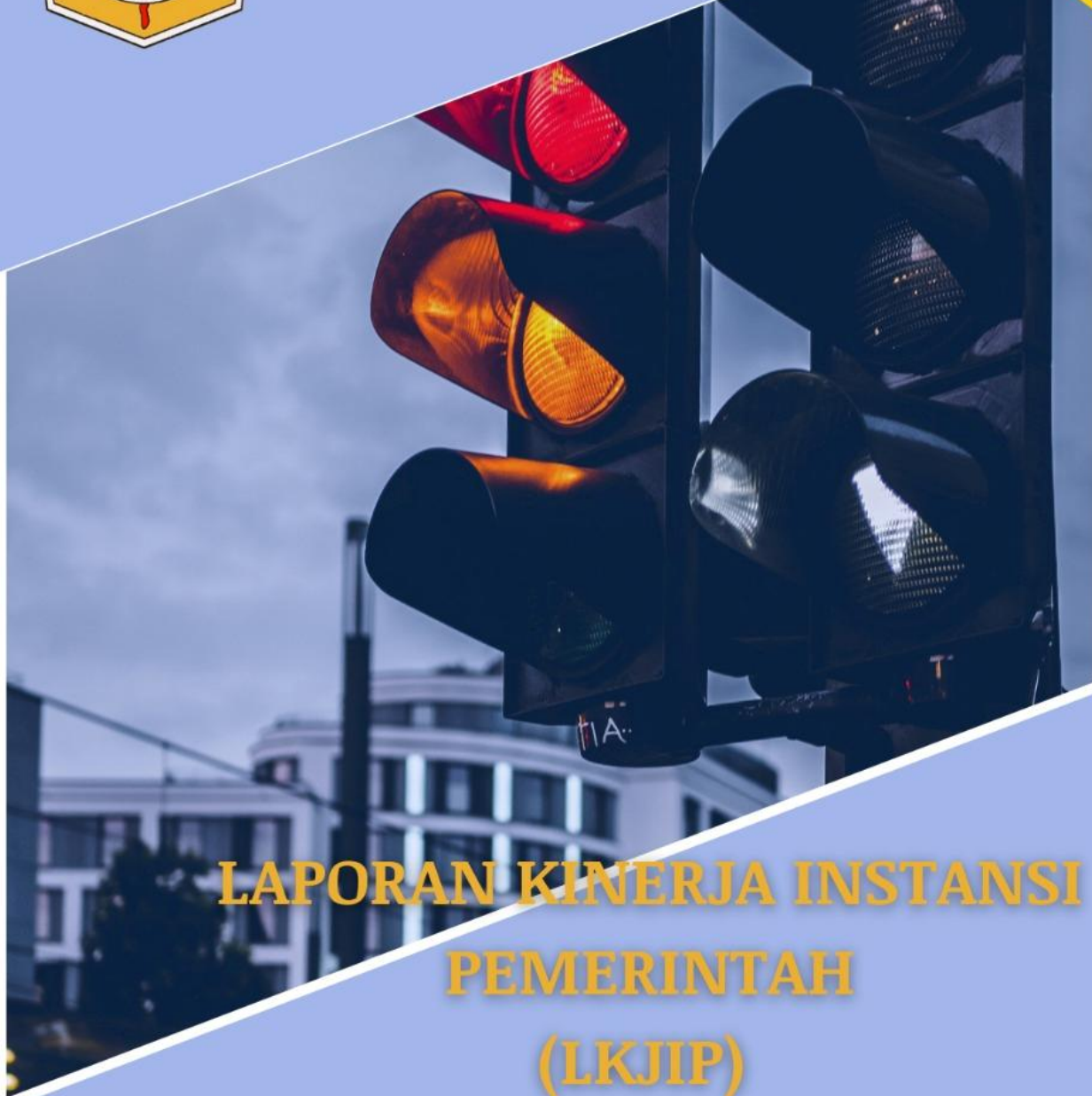




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PERHUBUNGAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH DATAR**
Tahun Anggaran
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait sehingga dimasa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

Kami menyadari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini jauh dari kesempurnaan disebabkan berbagai keterbatasan, baik keterbatasan kemampuan, waktu dan sebagainya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, terimakasih.

Batusangkar, Januari 2026



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH DATAR

SOFYAN ALI ZUMARA, ST

Pembina, IVa

NIP. 19720628 199203 1 003

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN guna untuk tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

Untuk penjabaran lebih lanjut dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan yang merupakan salah satu unsur pelaksana. Pemerintah Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah. Dinas Perhubungan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

a. TUGAS POKOK

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. FUNGSI

1. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
2. pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar hanya melaksanakan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

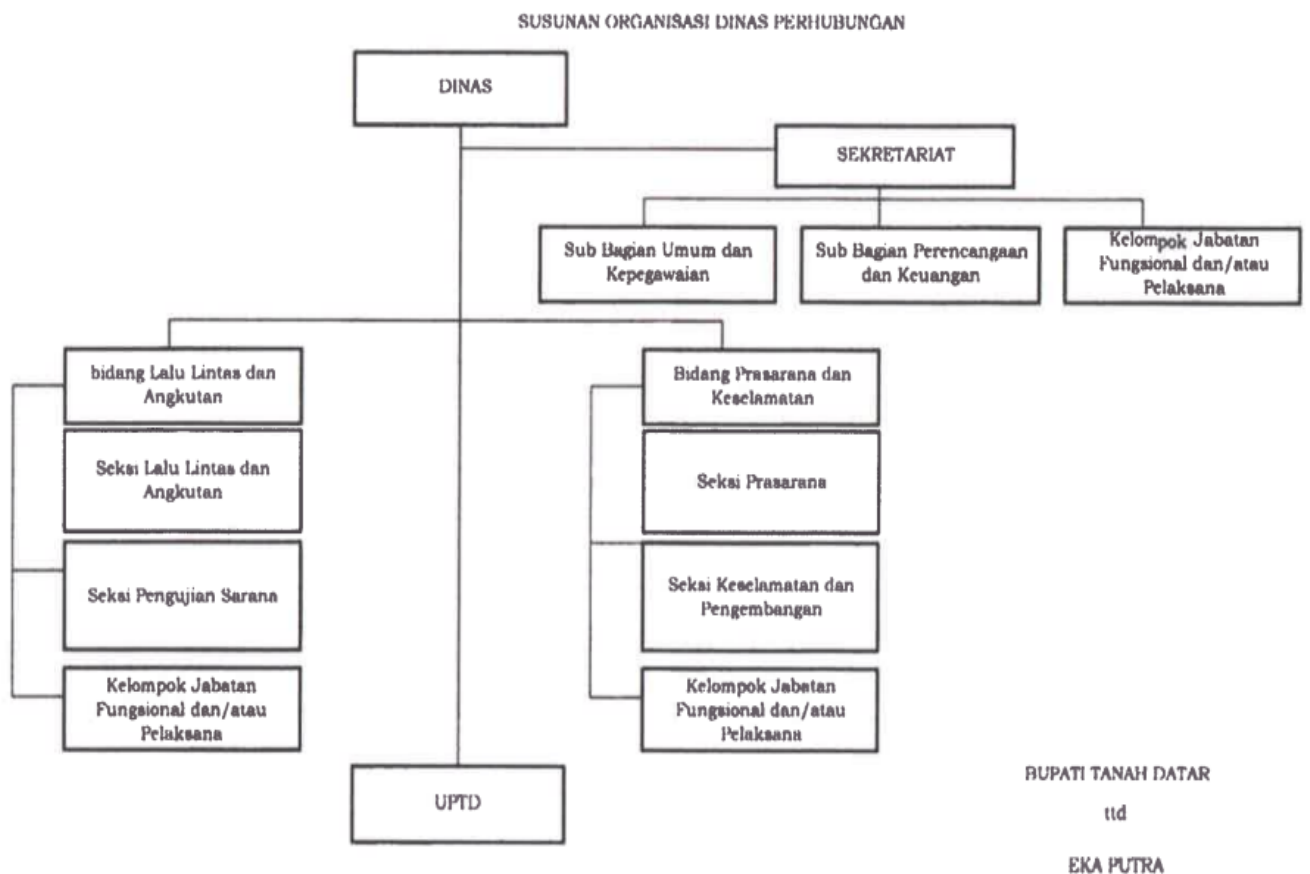
c. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Keselamatan dan Pengembangan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Tugas Pokok dan Fungsi Esselon II dan III Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas, melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan antara lain:

1. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
2. pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana,
- d. pengelolaan barang milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan

1. Bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
2. Bidang lalu lintas dan angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana

1. Bidang prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi.

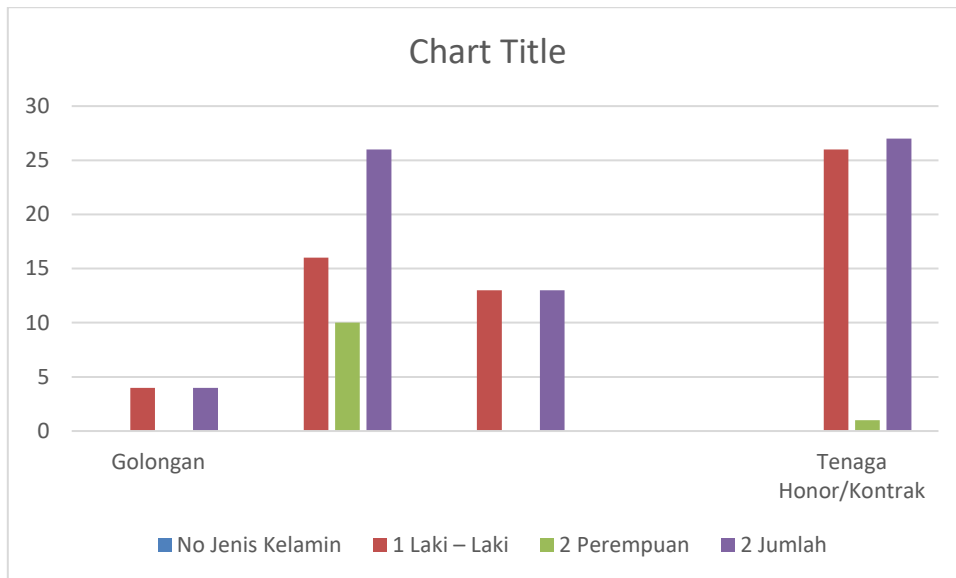
2. Bidang prasarana dan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal, salah satu yang mempengaruhi adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsi (Tupoksi) organisasi itu sendiri. Saat ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, terdapat 43 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 24 Orang Pegawai Honorer/Kontrak/THL dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.c.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Golongan				Tenaga Honor/Kontrak
		IV	III	II	I	
1.	Laki – Laki	4	16	13	0	25
2.	Perempuan	0	10	2	0	0
	Jumlah	4	26	15	0	25

Dapat dilihat seperti grafik berikut ini :



Tabel 1.c.2

Data pegawai berdasarkan pembagian per Bidang.

NO	UNIT KERJA	PNS	HONORER	JUMLAH
1.	Sekretariat	10	5	15
2.	Bidang TKSP	14	16	30
3.	Bidang Lalu Lintas	21	3	24
	Jumlah	43	24	

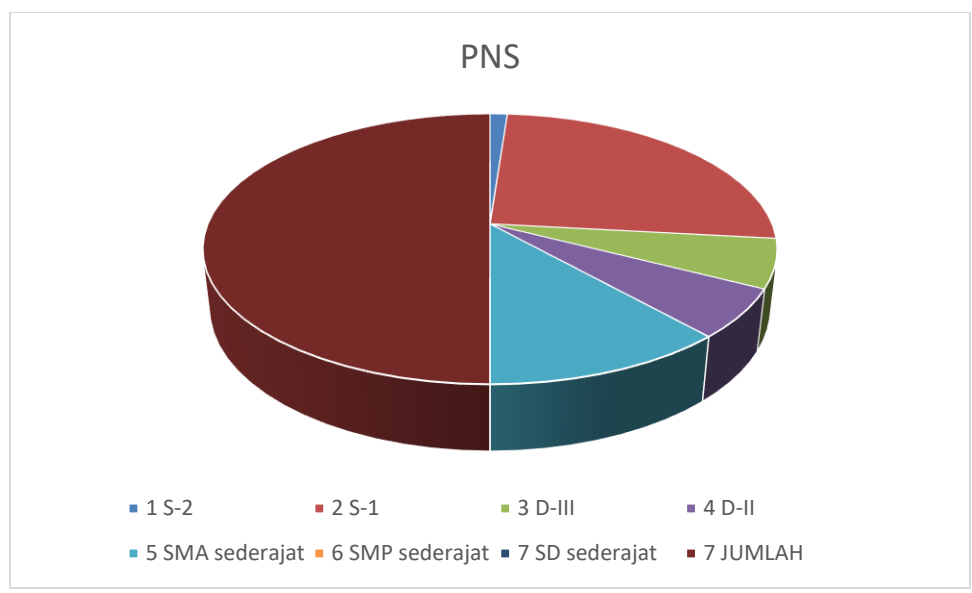
Tabel 1.c.3

Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	NON PNS	JUMLAH
1.	S-2	4	-	3
2.	S-1	25	2	27
3.	D-III	7	-	7
4.	D-II	4	-	4
5.	SMA sederajat	9	6	15

6.	SMP sederajat	-	7	1
7.	SD sederajat	-	10	2
	JUMLAH	43	24	67

Dapat dilihat seperti grafik berikut ini :



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dilengkapi dengan sarana dan prasarana aset operasional yang terkait langsung dengan kegiatan, disamping tanah dan gedung bangunan ada asset yang sangat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun jumlah asset yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.1
Asset Dinas Perhubungan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	4 Unit	
2	Kendaraan Roda 2	4 Unit	
3	Meja	37 Buah	
4	Lemari	9 Unit	
5	Lap Top	14 Unit	
6	Komputer	3 Unit	
7	Printer	9 Unit	
8	Kursi	76 Buah	

Untuk mewujudkan pemerintahan yang "Good Governance" maka fungsi pelayanan dituntut untuk ditingkatkan kualitas nya secara terus menerus sebagaimana diamanatkan dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Datar juga dihadapkan pada persoalan utama (strategic issued) ;

1. Masih terbatasnya tenaga pelayanan untuk pengamanan lalu lintas dan angkutan
2. Penempatan personil di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar harus yang mempunyai kompetensi dan mampu bekerja secara profesional dan tidak terkesan pegawai Dinas Perhubungan Pegawai Buangan.
3. Keterbatasan anggaran, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar belum bisa secara optimal melaksanakan pelayanan.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi antara lain ; Transportasi, Halte, Rambu, Marka jalan, Guard Rail, Traffic Light , dan belum adanya ATCS di kabupaten Tanah Datar.

5. Kesejahteraan aparat Pegawai di Dinas Perhubungan berupa pemberian Tunjangan Khusus dan penghargaan atas resiko dalam melaksanakan tugas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mendapat amanah untuk melaksanakan SPM dari Kementerian Perhubungan. Khusus di Daerah Kabupaten Tanah Datar, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan baru 1 (satu) Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena untuk Pelayanan Pelayaran, Penerbangan dan Kereta Api belum ada potensi yang dimiliki daerah sampai saat ini, untuk digunakan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mudah-mudahan untuk kedepan hal ini akan dapat dilaksanakan sejalan dengan perkembangan transportasi di Indonesia

B. PERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada RPJMD 2025-2029, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : “Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, UMKM dan peningkatan investasi.
4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
5. Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah.
7. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mendukung visi Kabupaten Tanah Datar. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar mendukung misi 4 yaitu mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dan misi 5 yaitu mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan informasi umum tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar serta uraian singkat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan gambaran mengenai visi, misi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang dilengkapi dengan matriks tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target jangka menengah yang dibagi pertahun selama periode renstra, bab ini juga berisi prioritas daerah, perjanjian kinerja dan rencana kerja beserta anggaran.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian capaian indikator kinerja organisasi tahun 2025. Selain itu disajikan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Datar dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsep visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kenyamanan Transportasi di Kabupaten Tanah Datar”

Untuk mewujudkan visi dan tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka cara-cara yang akan ditempuh atau misi pembangunan perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam keselamatan berlalu lintas.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Bidang Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja.
4. Meningkatkan kontribusi nyata pemerintah dalam bidang perhubungan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode tahun 2025 – 2029, seperti pada tabel 2.B.1

Tabel 2.B.1 Tujuan dan sasaran strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	Strategi
1.	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana dan ramah lingkungan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
		Meningkatnya pelayanan Perhubungan Darat	Meningkatnya kendaraan umum dan angkutan barang yang layak jalan
			Meningkatnya pelayanan kendaraan bermotor
2.	Terwujudnya penerapan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatkan tata kelola birokrasi yang akuntabel
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan inovasi

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam waktu tertentu dan target tertentu. Tujuan merupakan pernyataan visi yang dijabarkan dalam misi organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan, sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan Adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dan keberhasilan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahunan) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas,tangguh bencana,dan ramah lingkungan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kualitas infrastruktur berkualitas	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	76.58	79.82	83.24	86.48	89.72	93.14
		Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Persentase kendaraan yang layak jalan	75.21	75,50	75.8	76,00	76,21	76,50

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat baik (97,15)	Sangat baik (97,20)	Sangat baik (97,35)	Sangat baik (97,50)	Sangat baik (97,65)	Sangat baik (97,85)
2.	Terwujudnya penerapan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	72.5	72.52	72.53	72.54	72.55	72.56
		Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (si-Petir)	1	1	1	1	1	1

3. Sasaran dan Program

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Dinas Perhubungan menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel 2.C.1

Tabel 2.C.1 Program Dinas Perhubungan Kab. TD
berdasarkan sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kualitas infrastruktur berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2.	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Subkegiatan: Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota. 2. Kegiatan: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Subkegiatan: a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Subkegiatan: Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 4. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

		<p>Subkegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</p> <p>6. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor </p> <p>7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. </p>
--	--	--

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah , Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut dapat tergambar dalam tabel 2.D.1

Tabel 2.D.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kualitas infrastruktur berkualitas	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	76,58 %
2.		Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	100%
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel	BB (72,50)
4.	Terwujudnya Inovasi yang berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (si-Petir)	1

B. Prioritas Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar mendukung misi 4 dan misi 5 ini yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dan Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana, dan ramah lingkungan.

Dinas Perhubungan Kab.Tanah Datar dalam upaya mewujudkan misi di atas melalui cara antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam keselamatan berlalu lintas.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Bidang Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja.

4. Meningkatkan kontribusi nyata pemerintah dalam bidang perhubungan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Saat Ini/Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Kenaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kualitas infrastruktur berkualitas	1. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	76,58 %	76,58 %	-
2.	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	1. Persentase kendaraan yang layak jalan	75,21	75,21%	-
		2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (95,83)	Baik (97,15)	1,32
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (70,60)	BB (72,50)	1.9
4	Terwujudnya Inovasi yang berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (si-Petir)	1	1	-

Pada tahun 2025 untuk target Pengukuran Kinerja mengalami perubahan dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 18.013.566.989,00 menjadi Rp 18.425.033.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran sesudah Perubahan (Rp)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.574.507.517,00	13.117.784.296,00
	a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	20.000.000,00	2.600.000,00
	b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.539.360.960,00	12.443.486.896,00
	c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	87.040.300	47.248.800
	d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.	385.366.000	381.796.600
	e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	195.740.000	154.356.000
	f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	227.000.000	88.296.000
	g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasan Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	20.000.000	0
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.539.059.472	5.307.249.127
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	2.250.000
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.866.308.572	4.833.247.147
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.900.000	0
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.486.500	33.974.780
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	6.400.000
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeri	161.364.400	147.112.800
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.000.000	284.264.400

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis, dengan telah ditetapkan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025. Untuk mendukung kegiatan program pembangunan rencana kerja telah dialokasikan pembiayaan melalui rencana kerja dan anggaran Tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah yang tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat 3 bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Datar, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja , anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis masing-masing Satuan kerja perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah menyusun penetapan kinerja sebagaimana tercantum dalam Laporan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar seperti pada tabel dibawah ini :

No	Program/Kegiatan	Rencana Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		18.425.033.423
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5.307.249.127
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.250.000
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Induk dan DPA perubahan Dishub	2.250.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD dan LKJIP Dishub	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.833.247.147
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan 45 orang ASN Dishub	4.833.247.147
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan semester dan akhir tahun keuangan dan asset	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	0
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		33.974.780

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat listrik kantor dalam 1 tahun	0
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dalam 1 tahun	6.880.500
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun.	1.500.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya d kunjungan tamu dan rapat.	1.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan	24.594.280
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedia Peralatan HT	6.400.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		147.112.800
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan gaji jasa lainnya 2 orang	42.998.400
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan air, telepon dan listrik 1 tahun,	73.150.000
3	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Penyediaan alat kebersihan dan 1 orang jasa lainnya	30.964.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		284.264.400

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan 4 mobil dinas, 1 bus, 4 kendaraan roda 2 dan pembayaran pajak kendaraan dan 1 org jasa lainnya	251.900.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan kerja kantor	3.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor dan 1 org jasa lainnya keamanan	29.364.400
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		13.117.784.296
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi keselamatan berlalu lintas	2.600.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		12.443.486.896
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan PJU 1 paket, sesuai dengan aturan yang berlaku	70.000.000
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Traffilight 4 titik PJU 250 unit, 3 orang jasa lainnya orang, Tagihan Listrik PJU 1 tahun	12.373.486.896
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		47.248.800
1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pemeliharaan 1 unit terminal	47.248.000

		(jati), 1 orang jasa lainnya K3	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangun Fasilitas Parkir		381.796.600
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan gaji THL juru parkir 14 orang	381.796.600
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		154.356.000
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan PKB selama 1 tahun	134.356.000
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Telaksananya kalibrasi dan Pemeliharaan 13 unit Alat PKB	20.000.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		88.296.000
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengaturan Lalin dan Pengamanan Agenda Pemerintah Daerah dala 12 bulan	88.296.000
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya forum lalu lintas kabupaten	0
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersedian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terawasinya angkutan kota dan pedesaan	0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penghitungan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai instansi di akhir tahun anggaran pada tingkat indikator hasil (outcome). Selanjutnya terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi makro dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkompeten terhadap laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan misinya guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur penghematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.

2. Tingkat capaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan fomulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan serta kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam mengukur nilai capaian Kinerja terhadap masing-masing kinerja kegiatan, dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi setiap indikator kinerja (*in put, out put, dan out come*). Sementara untuk pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran dan keberhasilan yang dicapai organisasi, digunakan skala pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100	Sangat memuaskan
85 – 100	Sangat baik
70 – 85	Baik
55 – 70	Sedang
0 – 55	Kurang baik

Kriteria penilaian di atas, digunakan sebagai standar penilaian tingkat capaian baik indikator kinerja keluaran (**out put**), hasil (**out come**), kegiatan/sasaran maupun kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Misi IV dan V :

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	71,74%	71,76%	76,58 %	78,38%	76,58%	79,82%	109,25	106,71	100,4
2. Persentase kendaraan yang layak jalan	75,00 %	75,00 %	75,21 %	77,15 %	75,21%	84,38 %	102,86	100,28	112,19
3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Sekali (95,20)	Baik Sekali (95,40)	Sangat Baik (97,15)	Baik Sekali (95,83)	Baik sekali (97,049)	Sangat Baik (96,27)	100,66	101,73	98,74
4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72,50)	BB (72,00)	BB (72,50)	B (68,80)	BB (70,60)	BB (71,60)	94,89	98,05	98,76
5. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (si-Petir)	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Rata- Rata Capaian 2025									102,52

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ada 3 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui

pelaksanaan 2 (program) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan, 28 (Dua puluh delapan) subkegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 18.425.033.423,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)**. Setelah dilakukan analisa pencapaian kinerja sasaran secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 93.67%. Dengan capaian kinerja sebagai berikut (terlampir):

Analisa Capaian Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat di uraikan sebagai berikut:

Capaian kinerja sasaran 1 :

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	71,74%	71,76 %	76,58 %	78,38%	76,58%	79,82%	109,25	106,71	100,4

- I. Sasaran I: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Penyelenggaraan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini berupa Pengadaan Penerangan Jalan Umum sebanyak 8 unit yang merupakan pokir anggota DPRD.

- 2) Subkegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan alat kelengkapan jalan dengan terpeliharanya trafficligh sebanyak 4 unit dan Penerangan Jalan Umum sebanyak 464 unit.

b. Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- 1) Subkegiatan : Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C

Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan 1 unit terminal dan pembayaran 2 orang jasa lainnya K3 Terminal.

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja:

1. Persentase Penyediaan Alat kelengkapan Jalan (target kinerja =76,58)

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah Sarana dan Prasarana terpasang Tahun} \\
 = & \frac{2024}{\text{Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Tahun}} \times 100 \% \\
 & 2024 \\
 = & \frac{443}{555} \\
 = & 79,82\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja : } & \frac{79,82}{76,58} \times 100 = 100,4 \%
 \end{aligned}$$

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Tahun 2025	Realisasi Pengadaan (unit)	Yang dibutuhkan
----	----------------------	--------------------	----------------------------	-----------------

		(unit)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah	tahun 2025
1	Pengadaan Rambu-Rambu	191	0	-	-	-	-	-	191	59
2	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	92	0	-	-	-	-	-	92	342
3	Perlengkapan									
	- Trafficone	30	(11)	-	-	-	-	-	19	60
	- Cermin Cembung	23	(7)	-	-	-	-	-	16	10
	- Roadbarrier	0	0	-	-	-	-	-	0	50
4	Pembangunan Halte (sarana prasarana pendukung jalan)	6	0	-	-	-	-	-	6	14
5	Penerangan Jalan Umum	101	18	-	-	-	-	-	119	20
	Jumlah								443	555

Untuk target penyediaan alat kelengkapan jalan pada renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 adalah sebesar 76,58%.

Realisasi Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan pada tahun 2025 sebesar 79,82 % sedangkan pada tahun 2024 sebesar 76,58 % mengalami kenaikan sebesar 3,24% hal ini disebabkan adanya Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya yang merupakan Pokok Pikiran DPRD Tanah Datar dianggarkan pada perubahan anggaran sebesar Rp 70.000.000,00 berupa pengadaan dan pemasangan lampu Jalan Jorong Lumbang Bapereng Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab sebanyak 18 unit yang langsung dimeterisasi. Pada tabel diatas terdapat beberapa perlengkapan jalan yang sudah tidak bisa dipakai lagi seperti trafficone dan cermin cembung yang sudah habis masa pakai.

Di bawah ini terlampir dokumentasi pengadaan PJU yang berlokasi di Jorong Lumbang Bapereng Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab.



Foto.1 pengadaan PJU



Foto. 2 pengadaan PJU



Foto.3 pengadaan PJU

Pada tahun 2025 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mendapat bantuan teknis (Bantek) dari PT Jasa Raharja Cabang Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Bantek	Lokasi	Jumlah
1	Trafficone (10 unit)	SDN 02 dan 06 Sumanik	2 unit
		SD IT Muhammadiyah Lintau Buo Utara	2 unit
		Car Free Day	6 unit

Item di atas sudah diserahterimakan ke masing masing lokasi yang dimaksud.



Foto 4. Bantek serah terima di SDN 02 dan 06 Sumanik



Foto 5. Bantek serah terima di SD IT Muhammadiyah

Persentase Perbandingan Kejadian Kecelakaan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Persentase Peningkatan		
2024	2025	Total Peningkatan
140	203	45%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 angka kecelakaan lalu lintas sebesar 203 laka lantas sedangkan tahun 2024 sebesar 140 laka lantas dengan persentase peningkatan 45%.

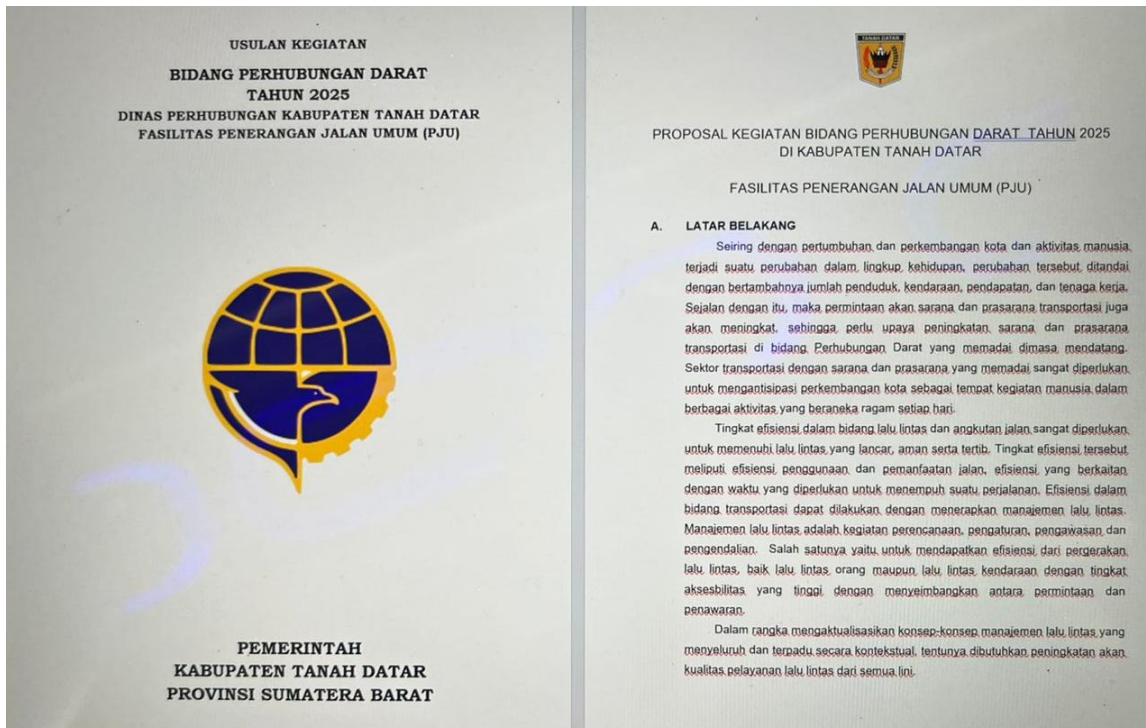
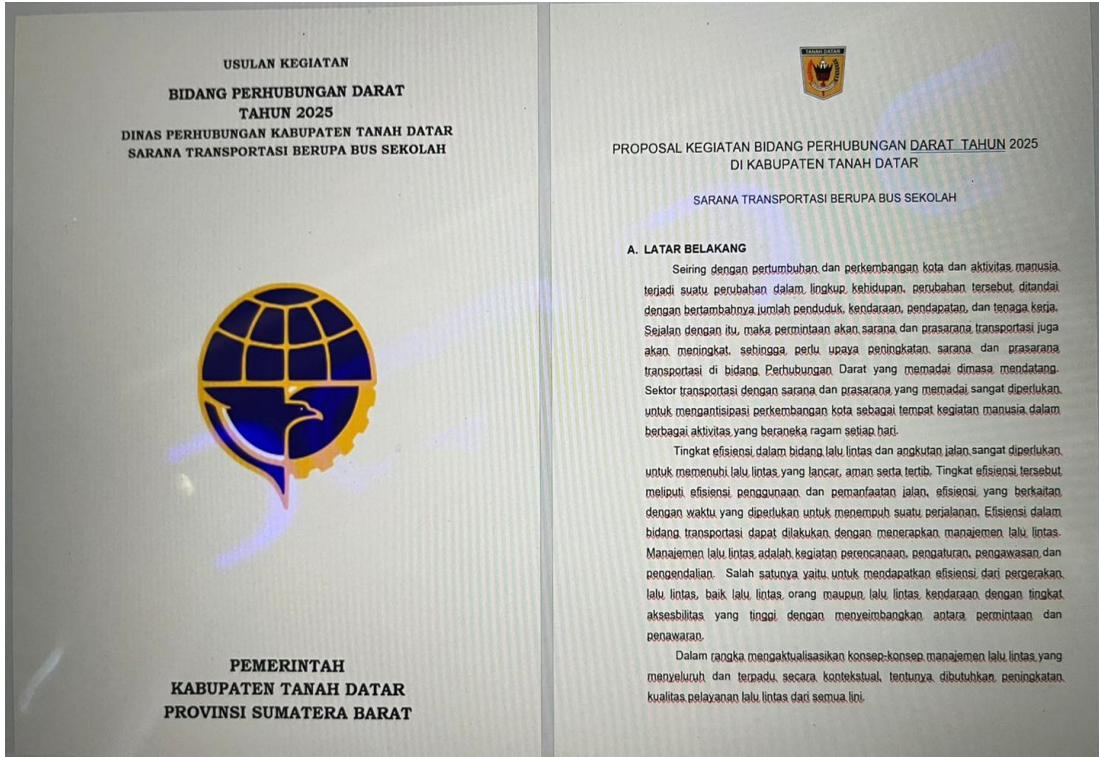
Permasalahan:

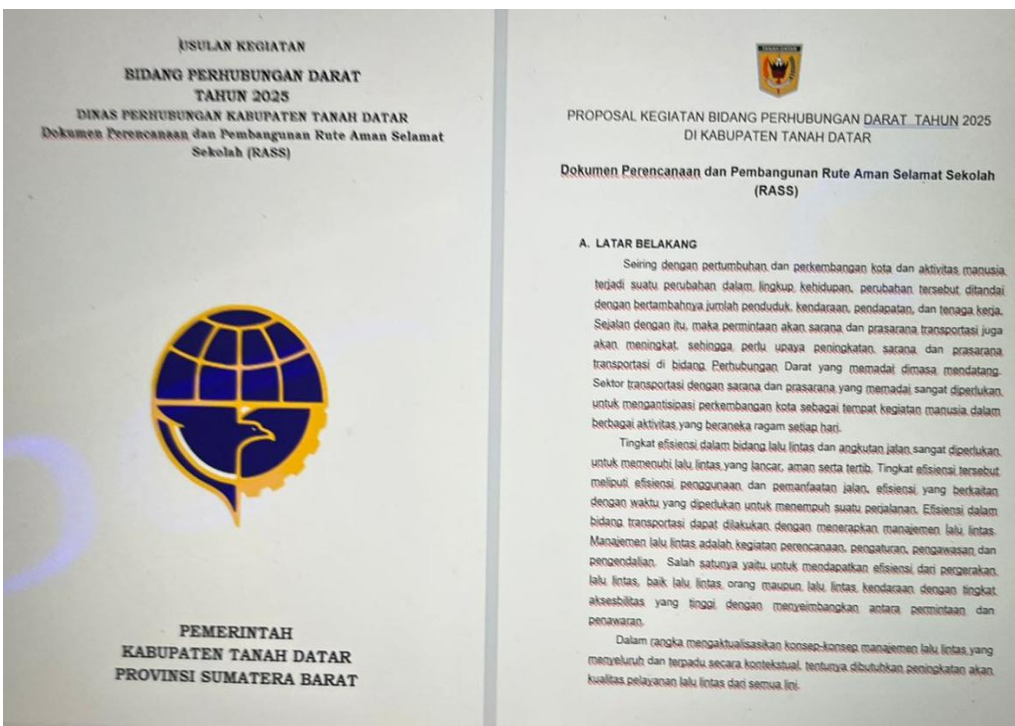
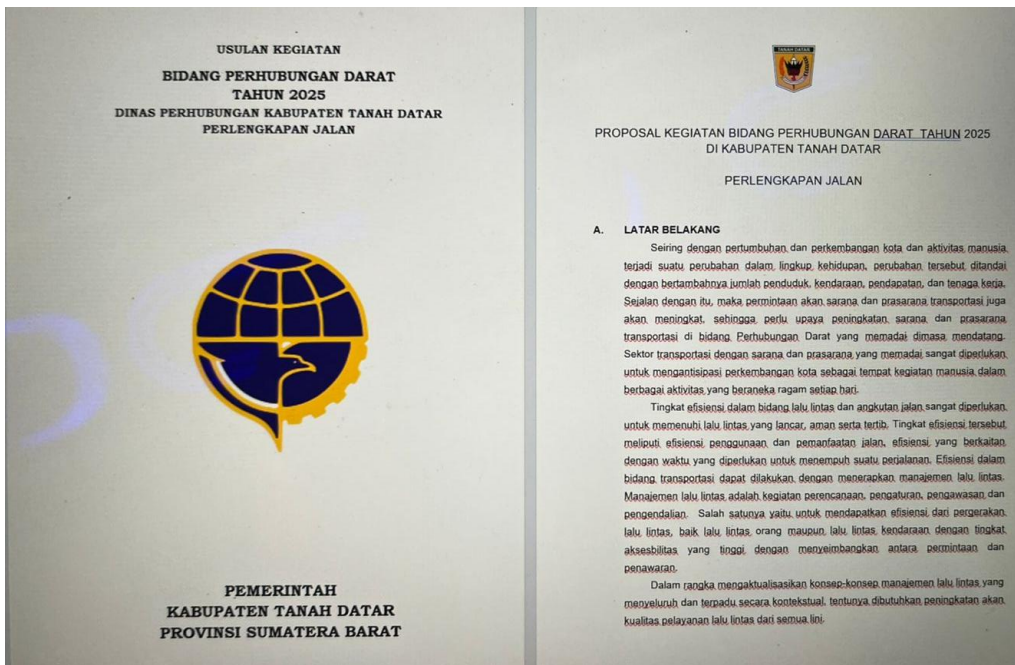
1. Masih tingginya angka penerangan jalan umum (PJU) kabupaten yang tiang listriknya ilegal /tidak termeterisasi sehingga menyebabkan tinggi pula angka tagihan listrik yang harus dibayar oleh Pemkab. Tanah Datar.
2. Kebutuhan perlengkapan jalan berupa Trafficone dan Road barrier yang selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah pengadaan, mengingat tata kota batusangkar yang sangat membutuhkan dua item di atas.
3. Ada beberapa perlengkapan jalan yang hilang pasca bencana banjir bandang dan lahar dingin pada tanggal 12 Mei 2024 berupa 1(satu) halte dan 4 (empat) buah rambu di Manunggal Kec. Lima Kaum.
4. Masih tingginya angka kecelakaan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 hal ini disebabkan karena banyak kekurangan perlengkapan jalan seperti Penerangan jalan umum pada 7 (tujuh) titik masuk ke kabupaten Tanah Datar dan kondisi jalan yang sudah banyak rusak/berlobang.

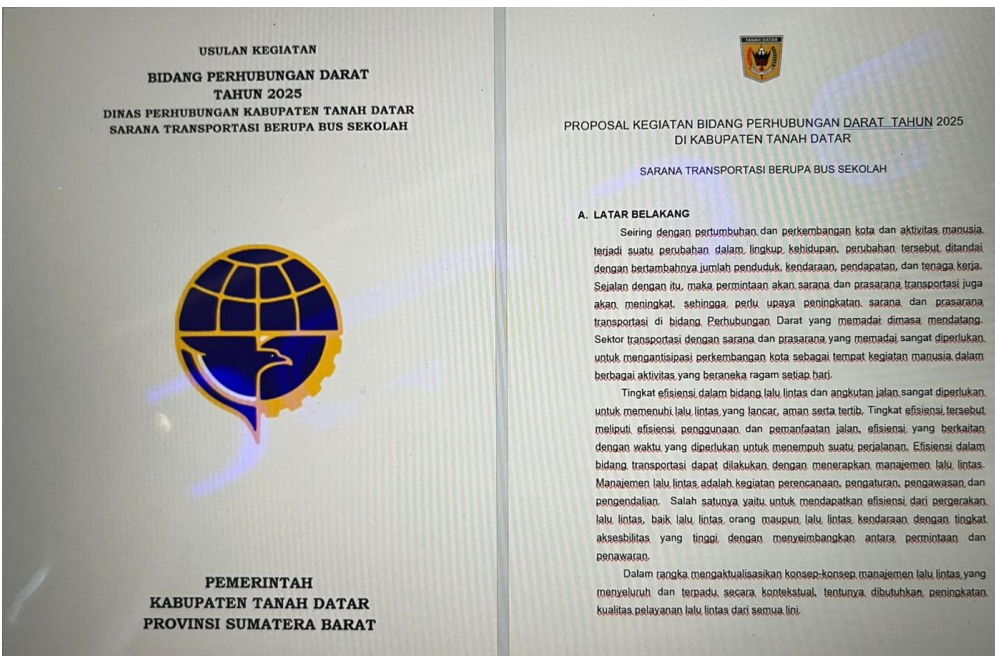
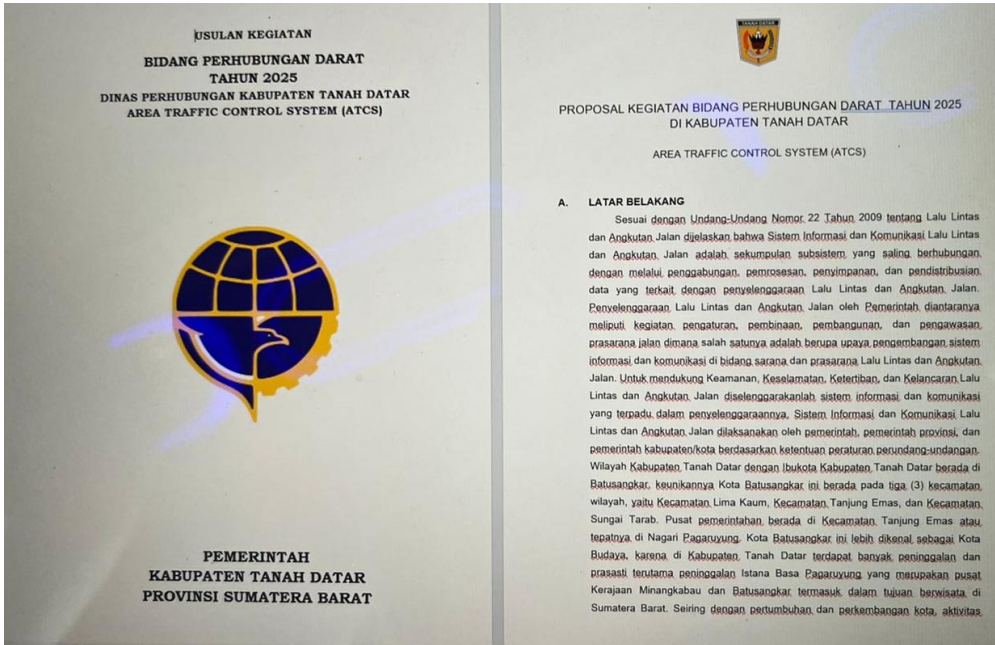
Solusi:

1. Pemkab Tanah Datar kiranya dapat mengalokasikan dana untuk meterisasi PJU pada tahun 2025.
2. Pemkab Tanah Datar kiranya berkenan untuk menyediakan anggaran untuk pembelian 2 (dua) item di atas pada tahun 2025, karena trafficone dan roadbarrier merupakan alat bantu lalu lintas untuk mengarahkan, mengatur dan memberi peringatan kepada pengguna.
3. Halte merupakan sarana penting untuk kelancaran dan tertib lalu lintas, karena halte berfungsi untuk mencegah penumpang mencoba naik atau turun dalam situasi berbahaya seperti di persimpangan atau saat bus berbelok dan tidak menggunakan jalur tepi jalan, oleh sebab itu kiranya Pemkab Tanah Datar dapat membangun kembali halte yang berlokasi di Manunggal demi kelancaran lalu lintas.
4. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar sudah berkoordinasi dengan BPTD Wilayah II Sumatera Barat Kementerian Perhubungan dan ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera terkait dengan pengadaan penerangan Jalan umum dan perlengkapan lainnya untuk Jalan provinsi dan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar pada kegiatan Forum Dinas Perhubungan se-Sumatera Barat dengan BPTD Wilayah II Sumatera Barat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun yaitu awal tahun dan akhir tahun pada tahun 2025 dan membuat proposal bantuan kegiatan bidang perhubungan tahun 2025.

Di bawah ini terlampir dokumentasi koordinasi tentang perlengkapan jalan sebagai berikut:









Capaian kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
6. Persentase kendaraan yang layak jalan	75,00 %	75,00 %	75,21 %	77,15 %	75,21%	84,38 %	102,86	100,28	112.19
7. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Sekali (95,20)	Baik Sekali (95,40)	Sangat Baik (97,15)	Baik Sekali (95,83)	Baik sekali (97,04 9)	Sangat Baik (96,27)	100,66	101,73	98,74

Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Kegiatan: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Subkegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Output subkegiatan ini berupa :

- a) penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor untuk melakukan KIR pada kendaraan angkutan umum dan penumpang. Untuk tahun 2025 seksi PKB telah melengkapi alat-alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian perhubungan sehingga untuk pelayanan KIR kendaraan dapat tercapai dengan maksimal karena didukung oleh peralatan yang handal dan tim pengguji yang telah terakreditasi.
- b) Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022, terhitung 1 Januari 2024 Pengujian Kendaraan Bermotor tidak lagi dipungut retribusi.

2) Subkegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan PKB dan Kalibrasi Alat untuk setiap tahunnya wajib dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar dengan menghadirkan tim kalibrasi alat PKB dari Kementerian Perhubungan.

b. Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan: Penetapan kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas yang

dilaksanakan di The Axana Hotel Padang dari tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2025 yang mana sebelumnya pada tanggal 8 Agustus 2025 2 orang siswi SMAN 1 Lintau Buo Telah melakukan pemaparan karya tulisnya di aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas pada kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. SMAN 1 Lintau Buo
2. SMAN 1 Batipuh
3. SMAN 1 X Koto
4. Kelompok Pemilik Kapal Tanjung Mutiara
5. MAN 4 Tanah Datar
6. SMAN 1 Rambatan
7. Kelompok Pemilik Kapal Tanjung Mutiara Bersama Balai Penyuluhan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan.
8. Kelompok Juru Parkir (Petir) pada Saat Operasi Ketupat dan Operasi Nataru tahun 2024.
9. Sosialisasi Keselamatan Angkutan sungai dan danau dalam rangka pengamanan Nataru tahun 2025.



Foto 6. Penutupan Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2025 di The Axana Hotel Padang pada 12 Agustus 2025



Foto 7. Sosialisasi keselamatan kepada kelompok pemilik kapal di Tanjung Mutiara



Foto 8 Sosialisasi keselamatan kepada kelompok petir

- c. Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Subkegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Output subkegiatan ini berupa pengaturan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar sehingga terpenuhinya pelayanan pengaturan dan pengamanan agenda pemerintah daerah, pengaturandan pengamanan rutin selama 12 bulan, Operasi Ketupat dan Operasi Nataru (Natal dan Tahun Baru).

d. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- 1) Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Output subkegiatan ini berupa:

- a) Terbayarkannya gaji 14 orang Jasa lainnya Juru Parkir pada lokasi titik parkir ditepi jalan umum sehingga dapat meningkatkan pelayanan perparkiran yang tertata dengan baik dan teratur.
- b) Sumber penerimaan pendapatan daerah berupa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

a. Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- 1) Subkegiatan: Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C

Output subkegiatan ini berupa:

- a) pengelolaan terminal yang merupakan salah satu prasarana perhubungan yang terkelola dengan baik.
- b) Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, terhitung 1 Januari 2024 Retribusi Jasa Usaha Terminal tidak lagi dipungut biaya.

Sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator Kinerja:

1. Persentase kendaraan layak jalan (target kinerja = 75,21 %)

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Kendaraan yang melaksanakan pengujian Tahun 2025}}{\text{Jumlah Kendaraan yang wajib Uji (PKB) Tahun 2025}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5917}{7012} \\
 &= 84,38\% \\
 \text{Capaian Kinerja : } & \frac{84,38}{75,21} \times 100 = 112,19 \%
 \end{aligned}$$

Jumlah Kendaraan yang melaksanakan pengujian Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Kendaraan (unit)
1	Januari	484
2	Februari	601
3	Maret	433
4	April	587
5	Mei	603
6	Juni	498
7	Juli	660
8	Agustus	668
9	September	352
10	Oktober	549
11	November	276
12	Desember	206
	Jumlah	5917

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (PKB) Tahun 2025

Jenis Kendaraan	U.	TU	D	Jumlah
1. Mobil Penumpang Umum				

☐ Taksi	0	0	0	0
☐ Oplet	23	0	0	23
☐ Angkutan Sewa	0	0	0	0
2. Mobil Bus				
☐ Seat 9 s.d 16	147	5	0	152
☐ Seat diatas 17	104	0	8	112
3. Mobil Barang				
☐ Pick Up	0	2146	5	2151
☐ Light Truck	150	513	4	667
☐ Dump Truck	83	145	0	228
☐ Tangki	0	0	0	0
☐ Box/Deliver Van	52	121	0	173
4. Kereta				
☐ Tempelan	0	0	0	0
☐ Gandengan	0	0	0	0
Jumlah				3506
Total	KIR	2X		7012

Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan pada tahun 2025 sebesar 84,38% sedang tahun 2024 sebesar 75,21 % mengalami kenaikan sebesar 9.17 % hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan KIR kendaraan.
- b. Ada beberapa kabupaten/kota yang PKBnya tutup karena terkendala biaya kartu uji yang cukup tinggi sehingga tidak bisa melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

c. Tingginya minat masyarakat yang melaksanakan KIR dikarenakan gratis/tidak dipungut biaya.

Pada tahun ini seksi PKB dalam melakukan Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor selalu memberikan himbauan berupa: Sosialisasi terkait dengan kelengkapan alat secara otomatis dan kecakapan tenaga penguji kepada masyarakat, untuk tidak ragu melakukan KIR kendaraannya 2 kali dalam 1 tahun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.



Foto 9. Pengujian Kendaraan Bermotor

Permasalahan:

Pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) masih terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Tingkatan level penguji pada seksi PKB baru pada level 3, hal ini diperlukan biaya untuk mengikuti diklat khusus penguji PKB.

2. Tidak adanya penyidik PPNS khusus untuk LLAJ sehingga Dishub Tanah Datar tidak bisa mengadakan pemeriksaan di jalan terkait angkutan umum dan barang yang bermasalah atau Over Load Over Dimensi (ODOL), sehingga menjadi salah satu penyebab angka kecelakaan tertinggi.
3. Ketersediaan Kartu uji yang minim disebabkan tingginya biaya pengadaan kartu uji PKB yang menjadi beban dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dikarenakan tidak ada lagi retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Solusi :

1. Agar Pemkab Tanah Datar melalui BKPSDM agar mengakomodasi biaya diklat penguji khusus untuk mencapai level 5 pada tahun 2025, sebagai persyaratan untuk mempertahankan akreditasi A. Biaya yang dibutuhkan untuk 1 orang penguji mengikuti diklat selama 1 bulan lebih kurang Rp 55.000.000,00 sedangkan tim penguji PKB berjumlah 5 orang. Saran agar mengirim 1 penguji minimal 1 orang tiap tahunnya.
2. Untuk PPNS bidang Perhubungan tahun 2025 Pemkab Tanah Datar Sebaiknya Tim TAPD Kab. Tanah Datar untuk Tahun 2026 dapat memfasilitasi diklat yang dimaksud minimal untuk 2 (dua) orang.
3. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar hendaknya tetap menganggarkan biaya kartu uji sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan IKK pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menjadi Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya.

2. Indek Kepuasan Masyarakat (target kinerja : Sangat Baik (97,15))

Indek Kepuasan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Kendaraan Bermotor (PKB) untuk semester I sudah dilaksanakan dengan perolehan nilai IKM 96.25 (Baik Sekali) dan semester II juga sudah dilaksanakan dengan perolehan nilai IKM 96.27 (Baik Sekali)

Indek Kepuasan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Kendaraan Bermotor (PKB) melalui 150 responden diperoleh penilaian sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai Tertimbang
U1	Persyaratan	600	4.000	0,440
U2	Prosedur	642	3.080	0,339
U3	Waktu Pelayanan	589	4.000	0,432
U4	Produk Layanan	600	4.000	0,440
U5	Kompetensi Pelaksana	600	4.000	0,440
U6	Perilaku Pelaksana	600	4.000	0,440
U7	Maklumat Pelayanan	600	4.000	0,440
U8	Penanganan Pengaduan	600	4.000	0,440
U9	Unsur Pelayanan	600	4.000	0.440
	Rata-rata	96,27		3.851

$$\text{Capaian Kinerja} : \frac{96,27}{97,15} \times 100 = 98,74 \%$$

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar pada Bulan November 2025, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam kategori “ Sangat Baik “ dengan nilai interval konversi IKM antara 88,31 – 100,00 dengan kategori Sangat Baik (nilai 96,27).

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya penyempurnaan

pelayanan publik (public service) sudah selayaknya dilakukan secara terus menerus, secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Dengan capaian ini, pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan unsur-unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Diharapkan capaian ini tidak membuat terlena, namun justru menjadi tantangan untuk mempertahankan dan senantiasa melakukan perbaikan di segala unsur pelayanan.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan beberapa unsure pelayanan yang dinilai kurang walaupun berdasarkan tanggapan responden sudah memiliki nilai mutu pelayanan kategori A dengan kinerja pelayanan “Sangat Baik” serta dalam mengoptimalkan unsur-unsur pelayanan lainnya, maka perlu diperhatikan dan diperbaiki beberapa unsur pelayanannya.

Dengan berpedoman pada temuan survey ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Beberapa rekomendasi langkah strategis tersebut antara lain:

- a. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi sikap, perilaku,

keterampilan, kepekaan, kedisiplinan, hal ini dapat ditempuh melalui upaya ;

1. Menerapkan dan mempedomani pedoman kode etik pegawai dalam rangka memotivasi petugas pelayanan terhadap nilai-nilai/standarisasi mengenai sikap layanan dan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan;
 2. Penetapan kebijakan internal terkait pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.
 3. Mengupayakan pembinaan peningkatan profesionalisme, keterampilan dan kemampuan pegawai secara berkala dan berkelanjutan di instansi terkait.
- b. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan, meliputi;
1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap layanan yang diselenggarakan (termasuk mekanisme pengaduan terhadap keluhan pelanggan), yang diinformasikan secara terbuka melalui media sosialisasi tertulis ataupun forum pertemuan diberbagai tingkatan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi dari penyedia layanan.
 2. Menerapkan dan mempedomani uraian tugas pegawai untuk meningkatkan aspek kejelasan, tanggungjawab dan kedisiplinan pegawai. Uraian tugas dipasang ditempat yang dapat dilihat oleh pengguna layanan.

- c. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan melalui upaya ;
1. Penataan kembali ruang pelayanan, selain memudahkan pelanggan, langkah ini juga memudahkan petugas mau pun pihak Dinas untuk mensosialisasikan program-program pelayanan dengan lebih komprehensif, termasuk memindahkan maklumat pelayanan di tempat yang mudah terbaca.
 2. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana pelayanan yang ada. Jika memang membutuhkan, perlu pengadaan peralatan penunjang pelayanan.
 3. Peningkatan kenyamanan lingkungan dengan pemenuhan (kebersihan, keindahan, kesederhanaan, kelayakan, dan keamanan) untuk mendukung kinerja pelayanan.



Foto 5. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Permasalahan:

Ruang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sampai saat ini masih dalam kondisi berlantai semen yang menyebabkan debu tebal menempel pada ruang uji KIR. Untuk memenuhi pelayanan publik sebaiknya diberi

keramik untuk kenyamanan dan kesehatan pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Untuk tahun anggaran 2026 agar Tim TAPD dapat memfasilitasi Ruang Uji Kir Kendaraan

Dengan adanya IKU dengan Sasaran Strategis :Meningkatnya pelayanan perhubungan darat” Output dari kegiatan ini terdapat besaran Retribusi yang diperoleh pada Dinas Perhubungan. PAD yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Perhubungan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Retribusi	TARGET		REALISASI	
		2024	2025	2024	2025
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	540.000.000	667.500.000	626.778.000	667.500.000
	Total PAD	540.000.000	667.500.000	626.778.000	667.500.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PAD tahun 2025 sebesar Rp 667.500.000,00 sedangkan PAD tahun 2024 sebesar Rp 626.778.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 40.722.000,00 (6.10%).

Capaian kinerja sasaran 3:

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
8. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72,50)	BB (72,00)	BB (72.50)	B (68,80)	BB (70,60)	BB (71,60)	94,89	98,05	98,76

Sasaran III: Meningkatnya tata kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Subkegiatan :Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

Output subkegiatan ini berupa tersedianya dokumen perencanaan yaitu DPA induk dan DPA Perubahan pada Dinas Perhubungan.

2) Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output subkegiatan ini berupa tersedianya dokumen LKPJ dan LPPD, LKjIP pada Dinas Perhubungan.

b. Kegiatan: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output subkegiatan ini berupa dokumen pembayaran gaji dan dokumen pembayaran TPP ASN Dinas Perhubungan sebanyak 43 orang.

2) Subkegiatan: Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output subkegiatan ini berupa dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Semester Dinas Perhubungan realisasi keuangan

c. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Output subkegiatan ini berupa penyediaan komponen Instalasi/Penerangan Kantor untuk kelancaran tugas sehari-hari.

2) Subkegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output subkegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover dengan realisasi keuangan sebesar

3) Subkegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output subkegiatan ini berupa penyediaan kebutuhan kantor yang perlu dicetak dan seperti Map, blanko, kwitansi amplop dan lain-lain serta penyediaan biaya fotokopi dan jilid.

4) Subkegiatan: Fasilitasi kunjungan Tamu

Output subkegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat serta penyediaan makanan dan minuman untuk tamu yang datang ke Dinas perhubungan

5) Subkegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output subkegiatan ini berupa terlaksananya perjalanan dinas biasa (dalam propinsi dan luar kabupaten) serta perjalanan dinas dalam kota (dalam kabupaten) serta terealisasinya biaya perjalanan dinas sesuai yang dibutuhkan.

d. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin

Output SubKegiatan: Tersedianya peralatan berupa Handy Talky (HT)

e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output subkegiatan ini berupa terbayarkannya gaji THL tenaga administrasi sebanyak 2 (dua) orang dan tersedianya materai dan biaya pengiriman paket pada Dinas Perhubungan

2) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output subkegiatan ini berupa tersedianya/terbayarkan tagihan listrik, air, telepon, internet tiap bulannya pada Dinas perhubungan

- 3) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
Output subkegiatan ini berupa tersedianya peralatan kebersihan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor serta tersedianya gaji 1 (satu) orang THL tenaga kebersihan pada Kantor Perhubungan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan operasional dinas yang didukung dengan BBM dan suku cadang kendaraan, terbayarkan pajak kendaraan operasional dinas dan KIR bus Sekolah serta terbayarkannya gaji 1 (satu) orang jasa lainnya pada Dinas Perhubungan
- 2) Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan operasional dinas melalui service kendaraan secara berkala.
- 3) Subkegiatan :Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya
Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya gedung kantor dinas perhubungan (cat pagar kantor) serta terbayarkannya gaji 1 (satu) orang THL tenaga keamanan kantor perhubungan

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja:

d. Predikat akuntabilitas Kinerja OPD (Target Kinerja : BB(72,50))

	Indikator	Bobot	Nilai
1	perencanaan kinerja	30	24,40

2	pengukuran kinerja	30	19,20
3	pelaporan kinerja	15	10,50
4	evaluasi internal	25	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)

$$\text{Capaian Kinerja} : \frac{71,60}{72,50} \times 100 = 98.76 \%$$

Adapun tujuan evaluasi ini, menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 adalah BB (71.60) sedangkan capaian yang diperoleh pada tahun 2024 adalah BB (70,60) terjadi peningkatan sebesar 1.00. hal ini disebabkan peningkatan pada nilai Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Permasalahan

Masih rendahnya komponen penilaian terkait dengan pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal dinas sehingga menyebabkan belum tercapainya nilai SAKIP sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi

Untuk meningkat item diatas harus ada dilaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi, dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kompetensi

SDM ASN Dinas Perhubungan dan peningkatan rapat evaluasi dan monitoring.

Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2024

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24.40 dari capaian tertinggi sebesar 30.00. Hal ini dibuktikan Dinas Perhubungan telah mempunyai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Renstra dan jangka pendek berupa renja dan telah didukung dengan perjanjian kinerja pegawai sampai ke level bawah, sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Untuk Aspek kualitas, dokumen perencanaan kinerja pada Dinas Perhubungan telah diformalkan dan Indikator Kinerja Utama telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, dokumen perencanaan kinerja secara umum telah memenuhi standar yang baik (SMART) serta telah membuat rencana aksi yang dipantau secara berkala, yang dipublikasikan melalui website resmi pemerintah daerah (PPID kabupaten Tanah Datar) dimana dokumen perencanaan tersebut diupload bulan Februari 2025.

Sedangkan dari aspek pemanfaatan, bahwa dokumen perencanaan kinerja telah digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran (DPA dan DPPA) dan penetapan perjanjian kinerja pegawai serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 19,20 dari nilai tertinggi 30.00. Hal ini diperoleh karena Dinas Perhubungan telah

mempunyai pedoman dalam pengukuran kinerja (telah membuat SOP) tentang pengumpulan data kinerja dan sudah memiliki defenisi operasional yang jelas dalam penetapan indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk aspek kualitas, Dinas Perhubungan telah melaksanakan pengukuran kinerja melalui rapat internal terkait capaian kinerja yang dipimpin langsung oleh kepala Dinas selaku pengambil keputusan. Pengukuran kinerja telah dijadikan kebutuhan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efesien secara berjenjang dan berkelanjutan serta menjadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dan pengukuran serta pemantauan kinerja secara berkala melalui laporan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per triwulan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu Aplikasi kinerja PNS (Sitampan dan E-Kinerja BKN).

Dari aspek pemanfaatan, pengukuran kinerja telah dijadikan kebutuhan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efesien secara berjenjang dan berkelanjutan, serta telah dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan bagi masing-masing pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja memperoleh nilai 10.50 dari nilai capaian tertinggi 15.00. Capaian nilai tersebut diperoleh karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah disusun dengan mempedomani Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3/241/ORG-2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk aspek kualitas bahwa Laporan Kinerja Dinas Perhubungan telah menyajikan analisis atas pencapaian kinerja termasuk didalamnya informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:

- Belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan jangka menengah (renstra)
- Belum secara optimal memanfaatkan aplikasi E-SAKIP dalam penyusunan laporan Kinerja Dinas Perhubungan

Sedangkan jika dilihat dari aspek pemanfaatan, Dinas Perhubungan telah menggunakan informasi pada laporan kinerja untuk penyesuaian aktifitas dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 17.50 dari capaian nilai tertinggi sebesar 25.00. Nilai evaluasi ini diperoleh karena Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja dengan mempedomani Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk aspek pemanfaatan, hasil evaluasi internal telah di manfaatkan untuk peningkatan implementasi SAKIP serta mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja namun evaluasi

akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi e-SAKIP) secara optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar agar:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan jangka menengah (renstra)
2. Mendokumentasikan hasil evaluasi internal dengan baik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (Aplikasi e-SAKIP) dalam melakukan evaluasi internal

Tindaklanjut Rekomendasi

1. Untuk tahun 2024 realisasi kinerja pada perubahan yang diperoleh sudah berdasarkan kepada dokumen perencanaan jangka menengah (renstra) sebagai berikut:

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja:

1. Persentase Penyediaan Alat kelengkapan Jalan (target kinerja berdasarkan renstra=71,76)

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Sarana dan Prasarana terpasang Tahun} \\ = & \frac{2024}{\text{Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Tahun}} \times 100 \% \\ & 2024 \\ = & \frac{443}{555} \\ = & 79,82\% \end{aligned}$$

$$\text{Capaian Kinerja : } \frac{79,82}{71,76} \times 100 = 111,23 \%$$

Sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator Kinerja:

1. Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan (target kinerja berdasarkan renstra = 96,00 %)

$$= \frac{\text{Jumlah Kendaraan yang melaksanakan pengujian Tahun 2024}}{\text{Jumlah Kendaraan yang wajib Uji (PKB) Tahun 2024}} \times 100 \%$$

$$= \frac{5277}{7016}$$

$$= 75,21$$

$$\text{Capaian Kinerja : } \frac{75,21}{96,00} \times 100 = 78,34 \%$$

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Perhubungan sudah dioptimalkan pada tahun 2025 menggunakan teknologi informasi yaitu <https://e-sakip.tanahdatar.go.id/signin/login>.

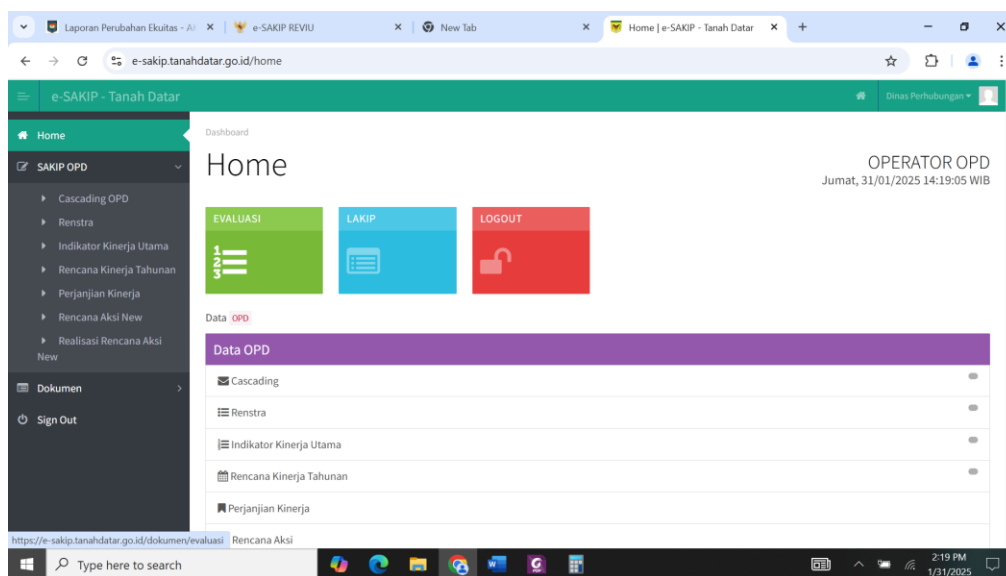


Foto 6. e-Sakip

Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
5. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	100	100	100

Sasaran IV: Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan, untuk Program dan Kegiatan yang mendukung tidak ada.

Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar SI-PETIR (Sistem Informasi Pelayanan Terminal dan Parkir) telah berjalan selama satu tahun sejak diresmikan pada bulan Agustus 2024. Pada Triwulan IV Tahun 2025, inovasi ini masih terus dilaksanakan dan dikembangkan dalam bentuk layanan pengaduan serta penyebarluasan informasi terkait kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Melalui SI-PETIR, informasi dan data seputar terminal serta perparkiran disampaikan secara terbuka dan daring (online) kepada masyarakat. Pada Triwulan IV, penyebarluasan informasi tersebut semakin ditingkatkan dengan pemanfaatan media sosial resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, melalui pembaruan rutin pada menu dan jendela informasi SI-PETIR, khususnya yang berkaitan dengan terminal dan parkir.

Adapun platform media digital yang digunakan dalam kegiatan publikasi SI-PETIR adalah sebagai berikut:

1. Website: <https://dishub.tanahdatar.go.id/si-petir>
2. Instagram: @pe_moda_dinasperhubungan

3. Facebook: Pe Moda Dinas Perhubungan

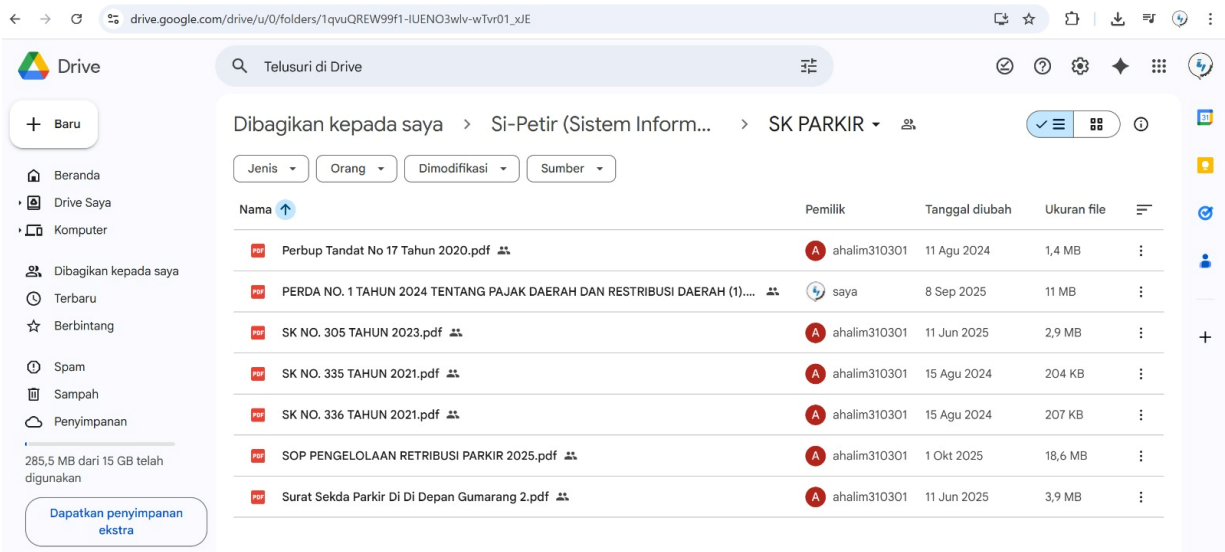
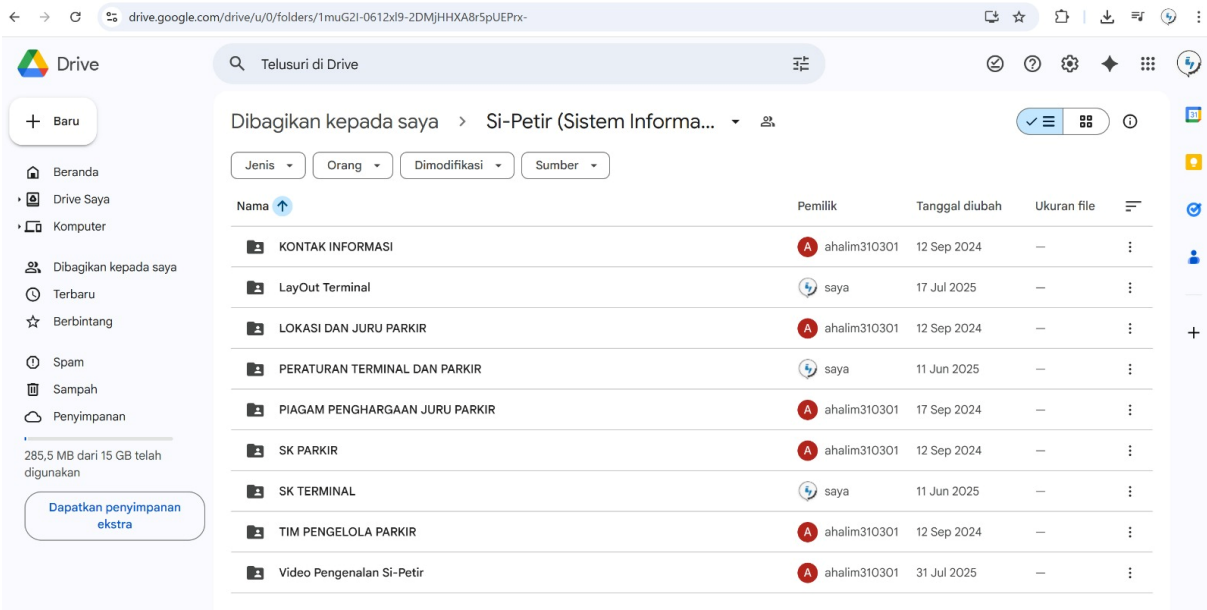
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penunjukan Anggota Tim Pelaksana SI-PETIR. Selain itu, secara berkala dilaksanakan rapat atau briefing tim untuk membahas rencana kegiatan, termasuk penentuan dan penyaringan konten yang akan diunggah agar sesuai dengan ketentuan dan etika publikasi.

Informasi terbaru yang dipublikasikan antara lain terkait pelaksanaan retribusi perpajakan, yaitu dengan pemasangan spanduk pemberitahuan “Tanpa Karcis, Parkir Gratis” yang juga disampaikan melalui akun media sosial resmi.



Jumlah Informasi yang dipublikasikan di media sosial instagram pada Tahun 2025 mencapai 115 postingan serta update informasi di website

<https://dishub.tanahdatar.go.id/si-petir>, dimana informasi tersebut terkait pelaksanaan retribusi perparkiran dan pengawasan perparkiran serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Berikut merupakan bukti dukung pelaksanaan inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.



Pe-moda Dishub Tanah Datar sedang bersama Tanahdatar TV. 17 Okt 2025 · 🌐

🚗 Layanan Pengaduan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar 🚗... Lihat selengkapnya

Mari bersama wujudkan Tata Kelola Parkir yang Transparan, Tertib, dan Berintegritas di Kabupaten Tanah Datar.

Pastikan Anda selalu meminta karcis resmi setiap kali memarkirkan kendaraan. Karcis parkir adalah bukti sah bahwa retribusi Anda masuk ke kas daerah

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH DATAR

1 2

Pe-moda Dishub Tanah Datar

< dishubtanahdatar 🛎️ ...

Pe-moda Dishub Tanah Datar

459 postingan 917 pengikut 252 mengikuti

Organisasi Pemerintah
 Jl. Tuanku Indomo no.1, piliang, Batusangkar
 Facebook : Pe-moda Dishub Tanah Datar
 Informasi Lalu Lintas Tanah Datar @info_lalintd
dishub.tanahdatar.go.id

Diikuti oleh wilmarajasa, fauziamaulani dan 42 lainnya

Mengikuti Kirim Pesan

Sasaran 4

Target : 1 inovasi Si-Diska (Sistem Informasi Dishub Terbuka)

Realisasi : 1 Inovasi

Capaian Kinerja : $\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$

Permasalahan

1. Tidak tersedianya *gadget* sebagai aset untuk mendukung kegiatan inovasi sehingga petugas inovasi dishub memakai *gadget* pribadi yang menjadikan inovasi tidak terlaksana maksimal

Solusi:

1. Menganggarkan belanja peralatan dan mesin (*gadget*) pada renja tahun 2026.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 	<p>12.443.486.896</p> <p>70.000.000</p> <p>12.373.486.896</p>	<p>11.760.203.968</p> <p>68.834.027</p> <p>11.691.369.941</p>	<p>94.51</p> <p>98</p> <p>94,49</p>
II	Meningkatnya pelayanan Perhubungan Darat	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: Pengujian kendaraan Bermotor Subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Kegiatan: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Subkegiatan: 	<p>674.297.400</p> <p>134.356.000</p> <p>20.000.000</p> <p>88.296.000</p> <p>47.248.800</p>	<p>657.530.340</p> <p>120.820.800</p> <p>19.820.800</p> <p>87.305.600</p> <p>47.248.800</p>	<p>97.51</p> <p>89.93</p> <p>98.14</p> <p>98,88</p> <p>100</p>

		Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 4. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	381.796.600	380.527.890	99.67
III	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin 5. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.307.249.127 2.250.000 0 4.833.247.147 0 0 6.880.500 1.500.000 1.000.000 24.594.280 6.400.000 42.998.000 73.150.000 30.964.400	4.811.741.613 2.250.000 0 4.414.624.323 0 0 5.919.408 1.499.900 990.000 24.594.280 6.398.040 42.986.200 50.726.846 29.604.438	90.66 100 0 91.34 0 0 86.03 99.99 99 100 100 100 69.35 95.61

		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		6. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Subkegiatan:			
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.900.000	199.835.695	79.33
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.998.333	99.94
		c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.364.400	29.314.150	99,83
4.	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	-	-	-	-
		Jumlah	18.425.033.423	17.229.475.921	93.51

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 telah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2025 anggaran belanja sebesar Rp 18.425.033.423,00 (93.51%) sedangkan di tahun 2024 sebesar Rp 18.597.986.802, (96.71%)- terjadi penurunan anggaran sebesar 0.93%.

Realisasi Keuangan yang turun dari tahun sebelumnya di sebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Tahun 2025 telah melaksanakan e katalog - inaproc dalam pelaksanaan pembelian barang pakai habis sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak boleh dipergunakan lagi, hal ini dapat di lihat pada sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Kenaikan Tarif Dasar Listrik yang disampaikan oleh mitra Dinas Perhubungan yaitu PLN Batusangkar, namun sampai akhir tahun TDL tersebut tidak jadi dilaksanakan sehingga terdapat sisa anggaran pada subkegiatan:
 - a. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik

- b. Rehabilitasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3. Bea Balik Nama (BBN) mobil hibah WTN 2024 dari kementerian Perhubungan yang semula dianggarkan Rp 49.750.000 ternyata yang direalisasikan hanya sebesar Rp 24.888.900 sehingga terdapat sisa anggaran yang cukup besar dapat di lihat di sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai satu kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perhubungan telah menyelesaikan LKjIP Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi, tujuan dan sasaran strategis dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah dapat berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. LKjIP tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 – 2029.

B. SARAN

1. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diharapkan masing-masing Bidang dapat mempedomani dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.
2. Untuk masa akan datang diperlukan beberapa poin penting:
 - a. koordinasi dengan tim teknis perlu ditingkatkan.

- b. Melaksanakan studi tiru dengan tujuan mengadopsi kebijakan di bidang perhubungan yang sesuai dengan renstra Dinas Perhubungan.